

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rosyid Al Atok Checks And Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang Dengan Sistem Bikameral Di 5 (Lima) Negara Kesatuan, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 1, No. 3, 2016, Hal. 261
- A. Rosyid Al Atok, Bagi Indonesia, jaminan atas penghormatan terhadap hak asasi dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia hal. 233., lihat Wahyuningsih, Prinsip Kesetaraan, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 2, No. 1, 2008, hal. 11
- A. Widiada Gunakarya, 2017, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Andi, hlm.17
- Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm.78
- Afandi, "Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM," 2008
- Agus Yudha Hernoko, 1995. Perceraian di Lingkungan Pegawai Negeri Sipil (Studi Observasi Terhadap Alasan Perceraian dan Penegakan Disiplin di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur' X Yuridika. hal 2
- Ahmad Faiz, at.al. Sistem Merit pada Sektor Pemerintahan : Proses Pengisian dan Penempatan Jabatan Pelaksana di Badan Kepegawaian Daerah Jawa Tengah Jurnal PERSPEKTIF, Vol. 9, No.2 tahun 2020,h. 407
- Ajib Rakhmawanto, Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif perencanaan Suksesi Berbasis Merit System, Jurnal Civil Service VOL. 14, No.1, Juni 2020:h. 9
- Al Khanif, Protecting the Rights of Religious Minorities in the Framework of International
- Andhika Wiratama, Eko Prasjo. 2019. Merit System dalam Mekanisme Rekrutmen dan Seleksi Bintara Polri. Jurnal Ilmu Kepolisian.Vol 13 No 2, 106-117.
- Andi Akhirah Khairunnisa, Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah, Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan) Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hal. 69
- Antonio Cassesse, 1994, Hak Asasi Manusia Di Dunia Yang Berubah, Jakarta: Yayasan Obor
- Arief Daryanto, Merit System Dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN, Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, VOL.1, NO.2, November 2007, h. 2
- Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia (Jakarta: Ind-Hill.Co,1992), hal.8.
- Bahder Johan Nasution, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik
- Bayu Dwiwiddy Jatmiko Menelisik Keadilan Dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Politik Pasca

Perubahan Uud 1945, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 13, No. 2, 2018. Hal. 222

Benyamin Lumenta, Pasien , Citra , Peran Dan Perilaku, Kanisius,1989, Hlm.81

Brotoharsojo, Hartanto & Wungu, Jiwo, 2003, Tingkatkan Kinerja Perusahaan dengan Merit System, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Budi Setiyocono, Birokrasi Dalam Perspektif Politik dan Administrasi, Nuansa Cendekia, Bureau For Development Policy, Democratic Governance Group,UNDP, 2007."Governance Cekli setya pratiwi, Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (Jakarta : LeIP,2007),111-112

Charizma Nugraha Fazli. "Penerapan Sistem Merit Dalam Pengisian Perangkat Desa". (Skripsi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018), halaman 13.

Dana pratiwi,netralitas ASN,Problematika dan Studi Kontemporer (Yogyakarta : The Journal Publing Anggota IKAPI, cet 1, 2022),1

Depkes RI. Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025. Depkes RI. 2011;

Dharma Setyawan Salam, Manajemen Pemerintahan Indonesia, Djambatan, Jakarta,Edisi Revisi, 2004, Hal. 169-170

Dr. Tri Raharianto, S.STP., M.Si., M.H. Promosi Jabatan Pimpinan Tinggi Perspektif Merit Sistem Indonesia. CV. Azka Pustaka. Bandung. 2022

Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia (Perspektif Internasional, Regional, Dan Nasional) (Depok: RAJAWALI PERS, 2018).

Eko. Rudita, L Prasojo,. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara: Membangun Profesionalisme Aparatur Sipil Negara. Civil Service Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS, volume 8 No 1,2014, h. 14.

Elly Fatimah, Modul Pelatihan Dasar Kader PNS (Manajemen Aparatur Sipil Negara), (Jakarta : lembaga administrasi negara 2016),36-43

Gunawan, Memahami Etika Kedokteran,Kanisius,Yogyakarta, 1991, Hlm.20.

Hadjon, Philipus M. et.all., 2012. "Hukum Administrasi dan Good Governance", Cetakan

Hartini, Sri dkk., Hukum Kepegawaian Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), halaman 2

Hayat, Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teore, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015, h.391

Herniwati and Rospita Adelina Siregar, Etika Profesi & Hukum Kesehatan, vol. 1 (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020).

Hetifah Sj. Sumarto, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003.

<http://www.kormonev.menpan.go.id>. Diakses tanggal 18 Maret 2017

https://toolsfortransformation.net/wp-content/uploads/2017/05/UU_NO_11_2005_hak-hakekonomi-sosial-dan-budaya.pdf.

Human Rights Law and Islamic Law, Global & Strategis, Juli-Desember 2013, hal. 201.

Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hal. 241.

I Made Subawa, 2008, Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya Menurut Ikhwan Matondang, Universalitas Dan Relativitas HAM, MIQOT, Vol.XXXII No. 2, JuliDesember 2008, hal. 204

Ilham Arisaputra, Muhammad, 2013."Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam

Ilham, Andi, 2013,"Upaya Pemerintah mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Wilayah Kec. Bontang Barat", Jurnal Administrasi Reform, Vol. 1 No. 1;

Indaru Setyo Nurprojo, Merit System Dan Politik Birokrasi Di Era Otonomi Daerah, Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS VOL. 8, No.1, Juni 2014, Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Jenderal Soedirman,Hal. 47

Internasional Pokok-Pokok Hak Asasi Manusia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 183

Ishak, A.M., Hubungan Penerapan Sistem Merit dengan Kinerja Dokter di Rumah Sakit Faisal Makassar, 2011.

Joko Widodo, Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah dalam Muhammad ilham Arisa Putra, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam penyelenggaraan Reformasi Agraria, Yuridika: Volume 28 No 2, Mei - Agustus 2013

Kasman Siburian and Ondo Puro Hutahaeen, "Tinjauan Yuridis Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Saat Terjadi Wabah Virus Covid-19 Dalam Karantina Wilayah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Kekarantinaan Kesehatan," NOMMENSEN JOURNAL OF LEGAL OPINION 2, no. 02 (July 30, 2021): 193-202, <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.386>.

Khobiburrohma, Eviva Nur dkk. Penerapan Sistem Merit dalam Birokrasi Indonesia untuk Mewujudkan Good Governace. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol 3 No 3 (Desember 2020), pp 139-148.

Kismawati, Andi, 2011."Analisis Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Prima", Universitas Negeri Makassar, Humanis, Volume XII Nomor 2

Komang AI, Mujiati NW, Utama IWM. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu; 2012.

Komisi Aparatur Sipil Negara, Pemetaan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), (Jakarta, 2018), halaman 9.

Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Ditetapkan oleh Resolusi

Kumorotomo, W., 2005. Akuntabilitas birokrasi publik: skDiterbitkan atas kerjasama antara Magister adminsdengan Pustaka Pelajar

M. Hutauruk, 2004, Hak-Hak Azasi Manusia dan Warganegara, Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm.45

Majelis Umum PBB 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966. Diakses dari

Mccourt, W. (2007). The Merit System and Integrity in The Public Service. Conference on Public Integrity and Anticorruption in the Public Service, 29-30 May 2007, Bucharest.

Mertokusumo Sudikno and Pitlo A, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020).

Muhammad, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2015, h.7

Muhammmad riora, netralitas poltik aparatur sipil negara dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia, jurnal hukum 4, no 2 (oktober 2020), 364-365
<http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/view/189/98>.

Munir Fuadi, 2003, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Dalam Yetniwati, 2015 Pengaturan Upah Berdasarkan Prinsip Keadilan, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Jambi, hlm. 86.

Ni Putu Yayi Laksmi dan I Ketut Makeling, "Penyelenggaraan Manajemen ASN Berdasarkan Sistem Merit Menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara". (Jurnal Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018), halaman 7

Nicken Sarwo Rini, Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Peraturan Daerah Di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan, Jurnal HAM, Vol. 9, No. 1, 2018. Hal. 20.

Nur Asiah, "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam," DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 15, no. 1 (January 9, 2018): 55-66,
<https://doi.org/10.35905/diktum.v15i1.425>.

Nur Kholis, Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt Of Court, Jurnal Legality, Vol. 26 No. 2,

Nurwita Ismail, Merit System Dalam Mewujudkan Transparansi Pembinaan Karier Aparatur Sipil Negara, Jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 1, Januari 2019, h.2.

Pasiak, Pit dkk, Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Sistem Merit

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Bitung. *Lex Administratum*, Vol. VIII/No.2/Apr-Jun/2020.

Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia", *Yuridika*: Volume 28 No 2, Mei - Agustus; KASN, 2023. Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 283/KEP.KASN/C/XI/2023 tentang Penetapan Kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

Peter Baehr, Pieter Van Dijk, Adnan Buyung Nasution, Leo Zwaak, 2001, Instrumen Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987).

Policing Belief: The Impact of Blasphemy Laws on Human Rights, by Jo-Anne Pratiwi, Cekli setya, SH, LL.M. dkk, 2016. "Penjelasan Hukum Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)", *Judicial Sector Support Program (JSSP)*, Jakarta.

Priansa DJ. *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta; 2014

Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi), Jakarta: Peradaban, hlm. 54

Prud'Homme, Zotero (Washington D.C: Freedom House, 2020) at 49-51

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Rencana Kerja Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2025

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019).

Rohana KM, Smith at.al, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham UII, hlm. 15.

Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Rozali Abdullah, 1986. *Hukum Kepegawaian*, Rajawali, hal 2

RPJMD Kota Pekalongan 2020-2024

S.P,Hasibuan, Malayu. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Salim HS dan Erlies Septianan Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 303.

Sampai Pemikiran Modern. *Yustisia* Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014, 120

Sang Gede Purnama, *HAM Dalam Kesehatan* (Denpasar: Universitas Udayana, 2016). 1-40

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2006), hal. 96.

Sedjun H. Manulang, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

Serlika Aprita and Yonani Hasyim, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia, I* (Jakarta Selatan: Mitra Wacana Media, 2020).

Setiawan Wangsaatmaja. 2017. *Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi*

Birokrasi. "Enam Point Penting dalam Sistem Merit." (Online), (<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/enam-poinpenting-dalam-sistem-merit>), diakses 20 Mei 2024).

Setiyani Setiyani and Joko Setiyono, "Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (May 10, 2020): 261-74, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.261-274>

Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Kota Pekalongan. Didownload pada 1 Agustus 2024. <https://simpeg.pekalongankota.go.id/>

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h8

Solechan, *Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Pelayanan Publik*, *jurnal administrasi law&Governance*, 2 no. 3 (Agustus 2019), 546

Sri Hartini, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.. 31

Sukanto Satoto, 2004, *Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*,

T. Gayus Lumbuun, *Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*,

Thoha, Miftah, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), hal 1.

Triputra Yuli Asmara, 2017, *Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global ke*

Triputra Yuli Asmara, 2017, *Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila*, *JH Ius Quia Iustum* Vol. 24, hal. 284.

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1962) hal. 9.

Veronica Komalawati, *Op.Cit*, Hlm. 19. 32

Yogi Zul Fadhli, *Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11 No. 2, Juni 2014, hal. 357

Yusnus Suhardi Ruman, "Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan", *Jurnal Humaniora*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2012, h.. 348

Yusuf B. *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2015.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Dasar Nagara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Jakarta : Kementerian PAN-RB RI. (https://id.wikipedia.org/wiki/Aparatur_Sipil_Negara, diakses 14 Mei 2024).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ,Op.,cit. Pasal 52.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Jakarta, 2017.

Peraturah Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Download <https://peraturan.bpk.go.id/Details/22278/perda-kota-pekalongan-no-5-tahun-2016>

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026. JDIH Kota Pekalongan : 2021.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara. 2018.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 2017.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 13A Tahun 2022 Tentang Pejabat Pengelola Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan

Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan

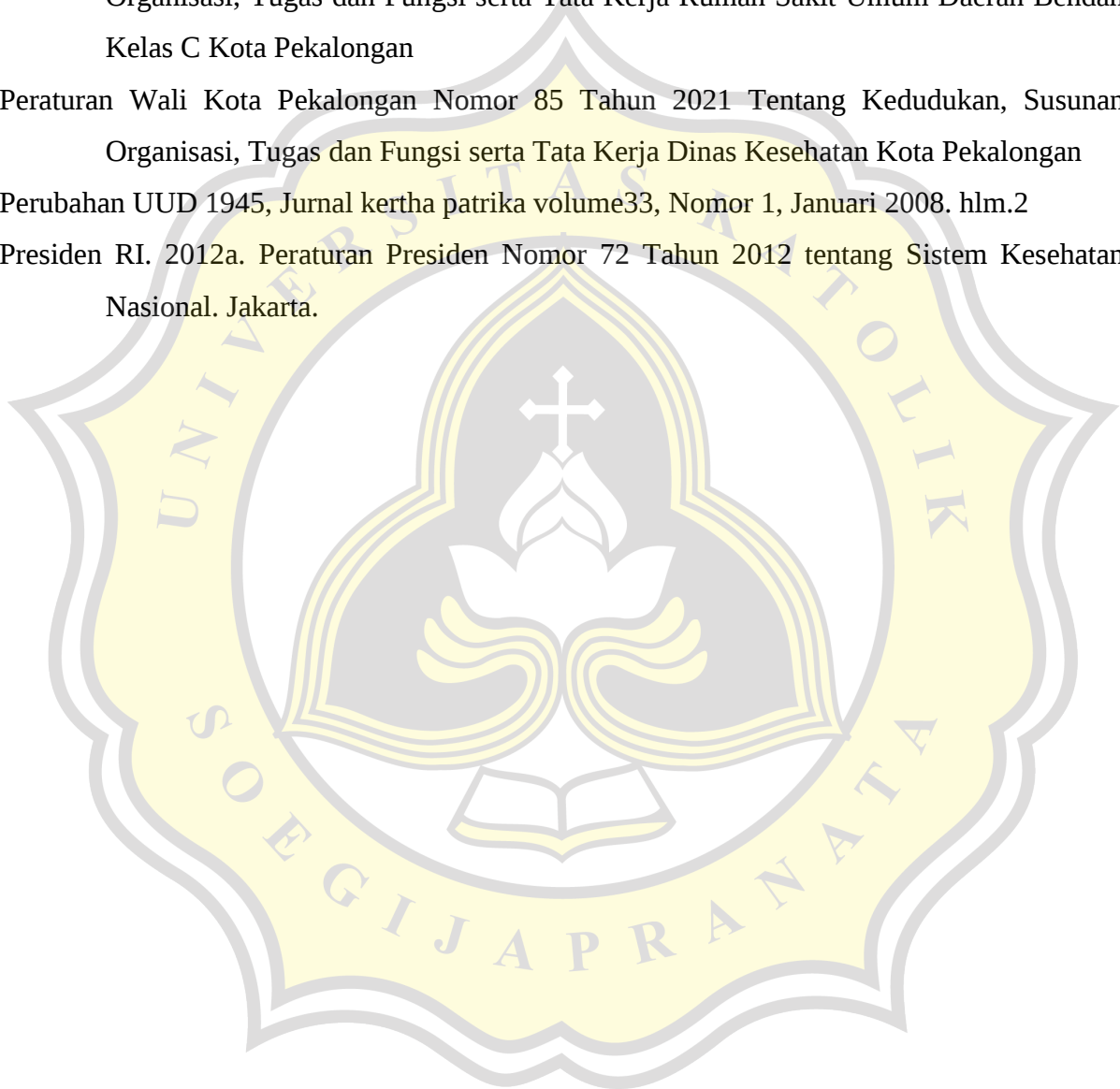
Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Wali Kota Pekalongan

Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bendaan Kelas C Kota Pekalongan

Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan

Perubahan UUD 1945, Jurnal kertha patrika volume33, Nomor 1, Januari 2008. hlm.2

Presiden RI. 2012a. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta.



WAWANCARA NARASUMBER

Analisis Diklat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan. wawancara pada tanggal 6 Agustus 2024

Analisis Kebijakan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan. wawancara pada tanggal 5 Juli 2024

Analisis Organisasi, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pekalongan. Wawancara pada 23 November 2024

Analisis Peraturan perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan, Wawancara Tanggal 20 Oktober 2024.

Analisis SDM Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan. wawancara pada tanggal 25 Agustus 2025.

Asesor SDM Aparatur BKPSDM Kota Pekalongan. Diwawancarai tanggal 30 Agustus 2024.

Direktur RSUD Benda Kota Pekalongan, wawancara, tanggal 21 Agustus 2024.

P. Donny Danardono, Ahli Hukum - Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, diwawancarai oleh peneliti, 7 Oktober 2024

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekalongan, diwawancarai penulis pada tanggal 10 September 2024.

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pekalongan. Diwawancarai pada tanggal 9 Agustus 2024

Kepala Bagian Umum RSUD Benda. Wawancara pada 21 Agustus 2024.

Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pekalongan. Diwawancarai pada tanggal 9 Agustus 2024

Kepala Bidang Mutasi dan Promosi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan. wawancara pada tanggal 8 November 2024.

Kepala Bidang Mutasi dan Promosi ASN, wawancara pada tanggal 12 Desember 2024 di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan

Kepala Bidang Pengadaan, Informasi dan Pembinaan Pegawai BKPSDM Kota Pekalongan, diwawancarai oleh peneliti, 15 Agustus 2024

Kepala Bidang Pengadaan, Informasi dan Pembinaan Pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan. wawancara pada tanggal 6 Agustus 2024

Kepala Bidang Pengadaan, Informasi dan Pembinaan Pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan. wawancara pada tanggal 6

Agustus 2024.

Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi ASN di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan. wawancara pada tanggal 6 Agustus 2024.

Kepala BKPSDM Kota Pekalongan, wawancara pada tanggal 19 Agustus 2024.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian BKPSDM Kota Pekalongan. Diwawancarai pada tanggal 8 Agustus 2024

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Wawancara, Tanggal 19 Agustus 2024.

Kepala subbagian Umum dan Kepegawaian RSUD Benda Kota Pekalongan, wawancara tanggal 21 Agustus 2024.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Wawancara, Tanggal 20 Agustus 2024.

Kepala Bagian Organisasi, wawancara pada tanggal 10 Desember 2024 di Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan.

Subkoordinator Pengelolaan Promosi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan wawancara pada tanggal 5 Juli 2024

